

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kesimpulan Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi PKL dalam Mencapai Perdamaian Konflik

1. Perubahan Personal

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan personal memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro. Kesadaran, empati, dan kemampuan memahami kebijakan menjadi indikator utama dalam proses transformasi konflik. Kesadaran PKL terhadap kebijakan relokasi masih terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menata kawasan agar lebih nyaman dan mendukung sektor pariwisata. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini agar solusi yang diambil lebih inklusif.

Empati memainkan peran penting dalam mengurangi ketegangan antara PKL dan pemerintah. Pada awalnya, PKL merasa tidak dipahami dan menganggap kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan wisatawan. Namun, seiring waktu, pemerintah mulai menunjukkan empati dengan menyediakan solusi berupa lokasi baru, pelatihan bisnis, dan bantuan transisi. Sementara itu, PKL juga mulai beradaptasi dengan strategi bisnis yang lebih modern, seperti pemanfaatan media sosial dan peningkatan kualitas produk.

Kemampuan memahami kebijakan juga menjadi faktor kunci dalam transformasi konflik. Kesenjangan pemahaman antara PKL dan pemerintah menghambat kelancaran kebijakan relokasi, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih efektif serta pendampingan agar PKL dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Dengan keterbukaan, komunikasi yang baik, serta dukungan dalam peningkatan kapasitas PKL, proses transformasi konflik dalam kebijakan relokasi dapat berjalan lebih baik dan menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih konstruktif antara pemerintah dan PKL.

2. Perubahan Relasional

Perubahan relasional menunjukkan bahwa pola komunikasi antara PKL dan pemerintah dalam kebijakan relokasi di Kawasan Malioboro masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada upaya untuk membangun dialog yang konstruktif, komunikasi yang terjadi belum sepenuhnya efektif dan sering kali memicu kesalahpahaman serta ketidakpercayaan dari pihak PKL terhadap pemerintah.

Salah satu permasalahan utama adalah sosialisasi kebijakan yang masih terbatas. Pemerintah hanya menyampaikan informasi melalui ketua paguyuban, sehingga tidak semua PKL mendapatkan pemahaman yang jelas. Akibatnya, banyak spekulasi yang berkembang, menimbulkan keresahan di kalangan PKL, dan memperburuk hubungan dengan pemerintah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan intensitas komunikasi secara langsung dengan seluruh PKL, bukan hanya dengan perwakilan kelompok.

Pendekatan yang lebih persuasif, edukatif, dan partisipatif melalui dialog terbuka, brainstorming, serta curah pendapat dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih konstruktif. Dengan cara ini, aspirasi dan kebutuhan PKL dapat lebih dipahami, sehingga kebijakan relokasi bisa diterima dengan lebih baik.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa janji-janji terkait fasilitas di lokasi baru benar-benar terealisasi agar PKL merasa diperhatikan dan tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan. Hingga saat ini, pola komunikasi dalam perubahan relasional belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam menciptakan hubungan yang lebih baik antara PKL dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif agar proses transformasi konflik dapat berjalan dengan baik dan mencapai perdamaian konflik dalam kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro.

3. Perubahan Struktural

Perubahan struktural pada aspek hubungan sosial dalam kebijakan relokasi PKL di Malioboro telah menimbulkan ketegangan sosial antara PKL dan pemerintah akibat perbedaan kepentingan. PKL merasa dirugikan karena kehilangan akses dan keterikatan dengan trotoar Malioboro, sementara pemerintah bertujuan menata kota dengan lebih baik dan mengembalikan ruang sumbu filosofi Yogyakarta. Meskipun Teras Malioboro masih menjadi bagian dari kawasan tersebut, PKL merasa relokasi menjauhkan mereka dari identitas budaya Malioboro. Oleh karena itu, diperlukan dialog terbuka untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan relokasi.

Dalam aspek ekonomi, kebijakan relokasi masih belum memberikan manfaat yang signifikan bagi PKL. Dampak ekonomi akibat relokasi menimbulkan konflik berkepanjangan, sehingga kebijakan ini tidak hanya perlu dipandang sebagai upaya penataan kota, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang lebih luas. Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar bagi PKL, seperti promosi, insentif ekonomi, dan pelatihan bisnis agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Pendekatan inklusif dan kolaboratif dapat mengubah konflik menjadi peluang bagi PKL untuk berkembang secara ekonomi.

Di sisi lain, hubungan kelembagaan dalam relokasi sudah menunjukkan perbaikan yang lebih konstruktif. PKL mulai memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah, meskipun masih ada tantangan dalam implementasi yang adil. Agar transformasi konflik ini berjalan lebih baik, reformasi kelembagaan harus dilakukan secara inklusif dan transparan. Jika tidak, ketimpangan ekonomi dan konflik dapat terus berlanjut.

Untuk menciptakan kebijakan relokasi yang lebih efektif dan menguntungkan semua pihak, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah, seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Kebudayaan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan PKL. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, transformasi konflik akibat relokasi dapat diarahkan ke solusi yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

4. Perubahan Kultural

Perubahan kultural dalam kebijakan relokasi PKL di Malioboro menunjukkan bahwa relokasi tidak menghapus nilai-nilai budaya, tetapi justru membuat kawasan lebih tertata, bersih, dan menarik bagi wisatawan. Namun, bagi PKL, perubahan ini menimbulkan perasaan kehilangan kendali atas usaha mereka yang sebelumnya lebih fleksibel dan berbasis kearifan lokal. Setelah relokasi, mereka harus mengikuti aturan resmi yang lebih ketat, yang berdampak pada identitas budaya dan sistem sosial mereka.

Transformasi konflik dalam aspek budaya tidak hanya tentang pemindahan fisik, tetapi juga tentang bagaimana menyesuaikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya dalam kondisi baru. Jika kebijakan relokasi dapat mengakomodasi identitas budaya PKL, maka transformasi konflik bisa lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika nilai budaya tidak diperhatikan, maka konflik sosial berpotensi terus berlanjut. Agar kebijakan relokasi dapat berjalan dengan baik tanpa konflik berkepanjangan, perlu ada upaya untuk menjaga ciri khas Malioboro dalam desain dan aturan lokasi baru. Strategi seperti *event* budaya, *storytelling*, dan *branding* yang menonjolkan identitas PKL sebagai bagian dari warisan Malioboro dapat membantu PKL tetap relevan dan menarik wisatawan ke Teras Malioboro 1 & 2. Kolaborasi antara pemerintah dan PKL dalam mempertahankan nilai budaya menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang lebih harmonis dalam proses transformasi konflik.

5.1.2 Kendala Proses Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi PKL dalam Mencapai Perdamaian Konflik

Proses transformasi konflik kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro menghadapi berbagai kendala dalam proses transformasi konflik. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan PKL menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerimaan kebijakan ini. PKL merasa relokasi merugikan mereka secara ekonomi dan sosial, terutama karena lokasi baru dianggap kurang strategis, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan interaksi sosial dengan pengunjung.

Kurangnya transparansi dan komunikasi dalam perencanaan relokasi memperparah ketidakpercayaan PKL terhadap pemerintah. Pemerintah menganggap relokasi sebagai solusi untuk menata kawasan Malioboro dan meningkatkan daya saing PKL, sementara PKL melihatnya sebagai ancaman terhadap penghidupan mereka. Kesenjangan komunikasi ini menyebabkan penolakan dari PKL dan menghambat efektivitas kebijakan relokasi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dua arah yang lebih baik melalui dialog terbuka, transparansi kebijakan, dan mekanisme umpan balik dari PKL.

Kendala lain dalam transformasi konflik ini adalah infrastruktur dan aksesibilitas di lokasi baru yang belum optimal. Infrastruktur yang kurang memadai dan akses yang terbatas membuat PKL kesulitan menarik pelanggan, sehingga memperburuk konflik ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menerapkan strategi promosi,

pemasaran digital, peta interaktif wisata, serta integrasi transportasi guna meningkatkan daya tarik lokasi baru.

kualitas SDM PKL juga menjadi tantangan dalam proses adaptasi. Meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan terkait digitalisasi usaha, banyak PKL yang masih enggan beradaptasi dengan cara berdagang yang baru. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar PKL dapat lebih siap menghadapi perubahan dan meningkatkan daya saing mereka di lokasi baru.

Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis keadilan sosial, kebijakan relokasi ini dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Jika pemerintah dan PKL dapat bekerja sama dalam mengatasi kendala yang ada, transformasi konflik dapat berujung pada solusi yang lebih konstruktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kaitannya dengan Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta

a. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi PKL dalam Perencanaan Relokasi

Penelitian lanjutan dapat mengkaji mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan PKL agar tercipta pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan relokasi. Studi mengenai model partisipatif dalam perencanaan kebijakan

dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dalam hal ini dengan adanya transparansi dan keterlibatan dapat meminimalkan konflik yang terjadi dalam sebuah kebijakan.

b. Evaluasi Dampak Jangka Panjang Kebijakan Relokasi

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada analisis dampak jangka panjang kebijakan relokasi terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya PKL. Dengan melihat tren ekonomi PKL pasca-relokasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai keberhasilan atau tantangan yang masih dihadapi.

c. Optimalisasi Infrastruktur dan Aksesibilitas Lokasi Relokasi

Studi mendalam mengenai kualitas infrastruktur dan aksesibilitas lokasi relokasi sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana perbaikan fasilitas dapat meningkatkan daya tarik kawasan baru. Penelitian ini dapat mengusulkan solusi berbasis data mengenai pengelolaan transportasi, tata letak kios, serta fasilitas pendukung lainnya agar lebih ramah bagi PKL dan wisatawan.

d. Strategi Inovasi dan Digitalisasi Usaha PKL

Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi efektivitas program pelatihan dan dukungan teknologi bagi PKL. Studi ini dapat menyoroti strategi terbaik dalam meningkatkan adopsi digital, seperti pemasaran *online* dan sistem pembayaran digital, yang dapat membantu PKL beradaptasi dengan perubahan ekonomi.

e. Kajian Kearifan Lokal dan Identitas Budaya dalam Relokasi PKL

Mengingat relokasi juga berdampak pada nilai budaya Malioboro, penelitian lebih lanjut dapat menggali bagaimana elemen budaya dan tradisi PKL tetap bisa dilestarikan di lokasi baru. Studi ini dapat mengeksplorasi konsep relokasi berbasis budaya yang tetap mempertahankan ciri khas Malioboro sebagai ikon wisata dan ekonomi rakyat.

f. Penguatan Peran Kelembagaan dalam Transformasi Konflik

Penelitian di masa depan dapat menganalisis peran kelembagaan dalam memastikan keberhasilan relokasi PKL. Kajian mengenai koordinasi antarinstansi pemerintah serta mekanisme evaluasi kebijakan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan relokasi.

g. Model Kebijakan Relokasi yang Berkelanjutan

Studi mendalam mengenai model kebijakan relokasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat menjadi kontribusi penting dalam kebijakan publik. Penelitian ini dapat membandingkan praktik relokasi di berbagai daerah untuk menemukan solusi terbaik yang dapat diterapkan di Malioboro maupun daerah lain dengan permasalahan serupa.

Melalui penelitian lanjutan dengan fokus pada aspek-aspek di atas, kebijakan relokasi PKL di Malioboro dapat dikembangkan menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

5.3 Rekomendasi

Transformasi konflik dalam kebijakan relokasi sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat proses tercapainya perdamaian konflik. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya beberapa rekomendasi agar proses transformasi konflik pada kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro mencapai sebuah perdamaian konflik dan menciptakan hubungan jangka panjang dalam keefektifan kebijakan relokasi. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut:

- a. Perlu pendekatan dialogis dan partisipatif agar PKL merasa lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dapat memahami isi dari kebijakan tersebut.
- b. Perlu adanya kegiatan curah pendapat secara langsung agar komunikasi PKL dengan Pemerintah lebih *intens* dan Pemerintah lebih responsif dalam melayani PKL agar terciptanya kembali kepercayaan dalam hubungan PKL dan Pemerintah.
- c. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan PKL, misalnya dengan memastikan janji-janji yang diberikan pada PKL benar-benar terpenuhi.
- d. Pemerintah perlu memperhatikan pembagian lapak PKL dengan pemerataan pembagian lapak dari letak lapak yang lebih strategis dan kapasitas lapak yang lebih adil sehingga PKL merasa adanya keadilan dalam relokasi ini bagi semua pihak.
- e. Pemerintah perlu meningkatkan akses menuju dagangan PKL yang lebih nyaman bagi pengunjung, misalnya seperti jarak lapak satu dengan lainnya

tidak terlalu dekat sehingga kelihatan lebih rapi, akses jalan menuju pedagang juga diperlukan adanya pelebaran agar tidak terlalu sempit dan terlalu berdekatan dengan barang dagangan PKL sehingga wisatawan merasa lebih nyaman saat mengunjungi Teras Malioboro.

- f. Pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pelatihan secara langsung dengan PKL agar PKL memahami pentingnya digitalisasi bisnis di era serba digital ini, agar produk produk dagangan mereka dapat dikelola dengan baik dan bisa meningkatkan pendapatan PKL.
- g. PKL perlu memiliki kesadaran akan pentingnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan program-program yang diberikan pemerintah demi keberlangsungan usaha PKL. Hal ini dapat mendukung masa transisi PKL menjadi pedagang yang mandiri dan peningkatan kesejahteraan para pedagang di Malioboro.